

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and describe the role of local government in preventing motorbike gangs, as well as the supporting and inhibiting factors faced by local governments in preventing motorbike gangs in the Jambi City area. The type of research is descriptive qualitative with data collection methods using interviews and documentation. The selection of informants was carried out using purposive sampling, while the data analysis was descriptive. The research results show that the role of the regional government in preventing motorbike gangs in the Jambi City area based on its role as a regulator is carried out by establishing Jambi Mayor Decree Number 356 of 2022, as well as the existence of SOPs for preventing motorbike gangs in accordance with the authority of each implementing party. The role as a motivator is carried out by carrying out supervision through patrol activities held in coordination with Forkopimda, as well as conducting outreach in coordination with the Social Service, sub-district to sub-district governments, and schools. The role as a facilitator is carried out by providing facilities that make it easier for the public to report motorbike gang actions, such as the Regional Police operator's WhatsApp and the e-Dumas application which is directly connected to law enforcement officials. Supporting factors faced by the local government in preventing motorbike gangs in the Jambi City area include coordination from various parties which makes it easier for implementing parties to carry out the instructions of the Mayor of Jambi regarding preventing motorbike gangs, as well as the existence of facilities and community support which really helps the authorities in monitoring motorcycle gang action. The inhibiting factors faced by the local government in preventing motorbike gangs in the Jambi City area are the lack of control or supervision from parents over their children and environmental factors.

Keywords: role, local government, motorcycle gangs

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan aksi geng motor, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor di wilayah Kota Jambi. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan *purposive sampling*, sedangkan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan aksi geng motor di wilayah Kota Jambi berdasarkan peran sebagai regulator dilakukan dengan menetapkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 356 Tahun 2022, serta adanya SOP dalam pencegahan aksi geng motor sesuai dengan wewenang masing-masing pihak pelaksana. Peran sebagai motivator dilakukan dengan cara melakukan pengawasan melalui kegiatan patroli yang diadakan melalui koordinasi dengan Forkopimda, serta melakukan sosialisasi secara berkoordinasi dengan Dinas Sosial, pemerintah kecamatan hingga kelurahan, serta sekolah-sekolah. Peran sebagai fasilitator dilakukan dengan menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat untuk melapor mengenai aksi geng motor, seperti WhatsApp operator Polda dan aplikasi e-Dumas yang langsung terhubung dengan aparat penegak hukum. Faktor pendukung yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor di wilayah Kota Jambi meliputi adanya koordinasi dari berbagai pihak yang mempermudah pihak pelaksana untuk menjalankan instruksi Walikota Jambi terkait pencegahan aksi geng motor, serta adanya fasilitas dan dukungan masyarakat sehingga sangat membantu pihak berwajib dalam pengawasan terhadap aksi geng motor. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencegah aksi geng motor di wilayah Kota Jambi adalah kurangnya kontrol atau pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka dan faktor lingkungan.

Kata kunci: peran, pemerintah daerah, geng motor